

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara umum pemberdayaan memiliki berbagai macam pengertian, beberapa pengertian pemberdayaan dari berbagai tokoh, diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memptivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.¹⁸

Selaras dengan yang diungkapkan oleh Zubaedi, bahwa Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.¹⁹

Senada dengan yang dipaparkan oleh Ginandjar Kartasasmitha, menurut payne yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi dalam buku *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan*

¹⁸ Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media,2007), hlm 42.

¹⁹ Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pusaka Cisendo,1996), hlm 145.

Masyarakat, bahwa suatu pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya ditujukan guna²⁰.

“To help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from environment to clients.”

(Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan, hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan).

Dari beberapa pernyataan tentang pengertian pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian ketrampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi.

2. Pemberdayaan Lanjut Usia

Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- A. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.

²⁰ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), hlm 77-78.

- B. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- C. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.²¹

Pemberdayaan menurut Esrom Aritonang yaitu pemberdayaan sebagai usaha untuk mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya) potensi, sumberdaya masyarakat agar membela dirinya.²² Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada tingkat individu dan sosial.

Sebagai proses pemberdayaan dalam memberdayakan para lansia, maka program-program dalam pemberdayaan lansia sebagai tujuan untuk mencapai perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas dalam kehidupan. Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan ketrampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.²³

²¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), hlm 58.

²² Esrom Aritonang, dkk, *Pendampingan Komunitas Pedesaan*, (Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 2001), hlm 9.

²³ Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm 62.

Dalam proses pemberdayaan, diperlukan pencapaian dalam pemberdayaan, melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dalam penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan:²⁴

- A. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Hal ini dapat diwujudkan dengan bentuk kegiatan pemberdayaan seperti pemanfaatan sumber daya dan ketrampilan. Menurut Ife, bahwa pelaku perubahan sebagai pemberdayaan masyarakat harus dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai ketrampilan dan sumber daya yang ada dalam komunitas ataupun kelompok.
- B. Penguatan, pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menjunjung kemandirian mereka. Masyarakat hendaknya mencoba memanfaatkan secara mandiri terhadap sumber daya yang dimiliki, seperti keuangan, teknis, dan alam, dan manusia daripada menggantungkan diri terhadap bantuan dari luar.²⁵ Melalui program pemberdayaan masyarakat, diupayakan agar masyarakat yang mampu memanfaatkan dan mengidentifikasi sumber daya yang ada dalam masyarakat seminimal mungkin.
- C. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari persaingan yang

²⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memerdekakan Rakyat*, (Bandung: PT Rideka Aditama, 2009), hlm 67.

²⁵ Ibid, hlm 62.

tidak seimbang antara kelompok yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat terhadap yang lemah.

D. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.

E. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok di masyarakat.

Berbagai macam bentuk pemberdayaan dapat dipadukan dan saling melengkapi guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Bentuk pemberdayaan antara lain pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan kesehatan, pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan sosial dan budaya, supaya dapat menikmati hari tuanya dengan diliputi ketentraman lahir dan batin.²⁶

Kesejahteraan lanjut usia, bahwa pemberdayaan lansia dimaksudkan agar lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemberdayaan lansia mengacu pada upaya mengembangkan daya (potensi) individu maupun kolektif penduduk lansia sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuannya dalam berbagai aktifitas, baik social, ekonomi, maupun politis. Pemberdayaan lansia melalui peningkatan kemampuan untuk tetap aktif dalam aktifitas produktif merupakan salah satu antisipasi agar mereka dapat mengurangi ketergantungan actual terhadap anggota rumah tangga yang lain.²⁷

²⁶ Keputusan Menteri Sosial RI nomor 07/HUK/KEP/II?1984, *Pola Dasar Pengembangan Bidang Kesejahteraan Sosial*, hlm 97.

²⁷ Ibid, hlm 28.

Pemberdayaan lansia dilakukan melalui berbagai cara, hal ini mengingat karena ada yang lansia berada dipanti, pada lansia berada di lingkungan keluarga dan masyarakat. Lansia yang berada dipanti merupakan jenis lansia yang terlantar karena sudah tidak memiliki anggota keluarga. Sedangkan lansia yang berada di lingkungan keluarga dan masyarakat tetap hidup bersama-sama dengan anak dan cucunya dalam menikmati masa tua.

3. Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai suatu proses, tentunya dilaksanakan secara bertahap, dan tidak bisa dilaksanakan secara instan. Adapun tahapan pemberdayaan menurut Ambar Teguh Sulistyan yang dikutip oleh Aziz Muslim dalam buku yang berjudul *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, bahwa tahap-tahap yang harus dilalui dalam pemberdayaan diantaranya adalah:²⁸

Pertama, tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Perlu membentuk kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Dalam tahapan ini pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan harus disadarkan mengenai perlu adanya perubahan untuk merubah keadaan agar dapat sejahtera. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran akan tentang kondisinya saat itu, dan demikian akan dapat merangsang kesadaran akan perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sehingga dengan

²⁸ Azis Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), hlm 33-34.

adanya kesadaran ini dapat mengunggah pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan dalam merubah perilaku.

Kedua, tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan ketrampilan, dalam hal ini perlu adanya pembelajaran mengenai berbagai pengetahuan, dan kecakapan ketrampilan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Dengan adanya pengetahuan, dan kecakapan ketrampilan maka sasaran dari pemberdayaan akan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang menjadi nilai tambahan dari potensi yang dimiliki. Sehingga pada nantinya pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Ketiga, tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan ketrampilan. Dalam tahapan peningkatan kemampuan intelektual dan ketrampilan ini sasaran pemberdayaan diarahkan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan dan kecakapan ketrampilan yang pada nantinya akan mengarahkan pada kemandirian.

Secara keseluruhan bahwa menurut Ambar Teguh Sulistyani menyatakan tahapan pemberdayaan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu kesadaran, transformasi pengetahuan dan kecakapan, sedangkan yang paling akhir adalah tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan ketrampilan. Sedangkan menurut Isbandi Rukminto Adi, bahwa tahapan pemberdayaan terdiri dari 7 (tujuh) tahapan, diantaranya adalah sebagai berikut:²⁹

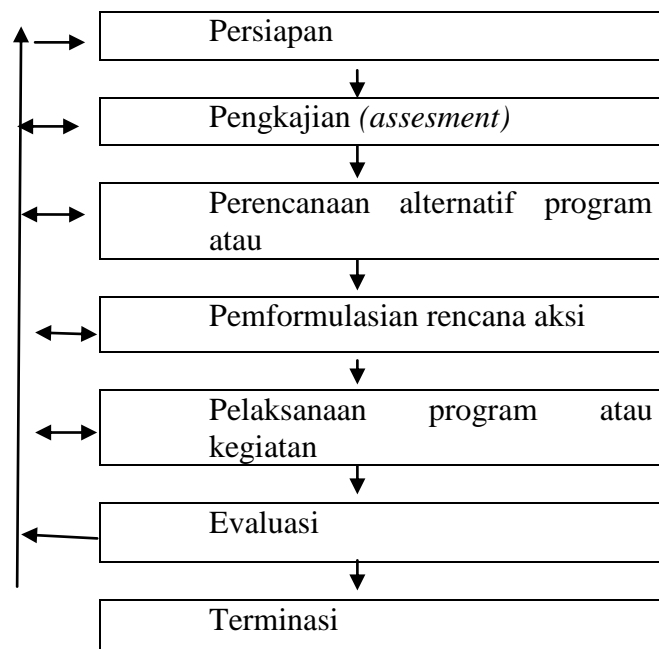
²⁹ Ibid, hlm 35-37.

- A. Tahap persiapan, yaitu petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih. Sedangkan penyiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.
- B. Tahap assesment, tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sasaran pemberdayaan.
- C. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, pada tahap ini fasilitator secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
- D. Tahap formulasi rencana aksi, pada tahap ini fasilitator membantu masing-masing masyarakat sasaran pemberdayaan untuk memformulasikan gagasan mereka terutama dalam bentuk tulisan bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal yang akan ditujukan kepihak penyandang dana.
- E. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini masyarakat mengimplementasikan agar apa yang telah dirumuskan bersama-sama. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan memerlukan adanya peran dari masyarakat, dan fasilitator. Perlu menjalin kerjasama yang baik antara fasilitator dengan

masyarakat karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik bisa melenceng saat di lapangan.

- F. Tahap evaluasi, pada tahap ini dilakukan sebagai proses pengawasan dari masyarakat dan fasilitator terhadap program pemberdayaan yang telah dilakukan. Evaluasi sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat bersama-sama dengan fasilitator.
- G. Tahap terminasi, tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Terminasi sebaiknya dilakukan jika masyarakat sudah bisa mandiri, bahkan dilakukan karena penyandang dana telah menghentikan bantuannya.

Bagan 2.1
Tahapan Pemberdayaan Masyarakat



Dari penjelasan teori tahapan pemberdayaan yang dijelaskan oleh Isbandi Rukminto Adi, dapat diketahui bahwa tahapan pemberdayaan dapat dilakukan

melalui 7 tahapan, meliputi tahap persiapan, tahap assesment, tahap perencanaan alternatif, tahap formulasi rencana aksi, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap terminasi.

Adapun upaya untuk pemberdayaan masyarakat terdiri dari tiga tahapan yaitu:

- A. Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan.
- B. Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat, dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah positif dan nyata, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjasi semakin berdaya dan memanfaatkan peluang.³⁰

Sedangkan menurut Syamsudin RS, ada tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak untuk diperjuangkan, yaitu:

- A. Pemberdayaan pada mata ruhaniyah, dalam hal ini terjadi degradasi moral pergeseran nilai masyarakat islam yang sangat mengguncang kesadaran islam. Oleh karena itu, pemberdayaan jiwa dan akhlak harus lebih ditingkatkan.
- B. Pemberdayaan intelektual, yang pada saat ini dapat disaksikan bahwa umat islam Indonesia telah jauh tertinggal dalam kemajuan teknologi, untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai perjuangan besar.

³⁰ Gunawan Sumodiningrat, *Pengembangan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Bina Pariwara, 2003), cet.2, hlm 16.

C. Pemberdayaan ekonomi, masalah kemsikinan menjadi kian identik dengan masyarakat islam Indonesia. Pemecahannya adalah tanggung jawab masyarakat islam sendiri. Untuk keluar dari himpitan ekonomi seperti sekarang ini, disamping penguasaan terhadap life skill atau keahlian hidup, ketrampilan berwirausaha pun dibutuhkan juga dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.³¹

Tujuan pemberdayaan adalah mendirikan manusia atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah yang lebih baik secara berkesinambungan. Oleh karenanya, pemberdayaan atau pengembangan masyarakat adalah upaya untuk memperluas pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Untuk itu setiap pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan martabat manusia sehingga menjadikan masyarakat yang maju dalam berbagai aspek.

4. Hasil Pemberdayaan

Suatu kegiatan pemberdayaan tentunya memiliki beberapa indicator penentu pencapaian dalam pemberdayaan tersebut. Hasil pemberdayaan menurut Edi Soeharto adalah pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan, dan kelompok lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam hal³²:

³¹ Syamsudin RS, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam Dalam Da'wah Islam*, (Bandung: KP. HADID, 1999), hlm 2.

³² Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005), hlm 59-60.

- A. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- B. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- C. Berpartisipasinya dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil pemberdayaan dapat dilihat dari tingkat pemenuhan kebutuhan, peningkatan pendapatan, dan partisipasi.

B. Bina Keluarga Lansia (BKL)

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lansia, diperlukan peran keluarga yang turut berpartisipasi aktif mendampingi aktivitas lansia di masa senjannya, karena keluargalah orang terdekat dari lansia itu sendiri, baik anak, menantu maupun cucu bahkan adik atau kakak lansia itu sendiri. Kelompok bina keluarga lansia dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya lansia tangguh dan berjalan secara berlanjut apabila memiliki mekanisme kerja yang dipahami dan disepakati oleh anggota kelompok.³³ Pokok-pokok kegiatan kelompok BKL/kader antara lain:

³³ Rahardjo, T.B.W, *Mekanisme Kerja Kelompok Bina Keluarga Lansia*, (Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan, 2014), hlm 65.

- A. Kegiatan utama dilakukan meliputi penyuluhan, temu keluarga, kunjungan rumah, rujukan, pencatatan dan pelaporan serta memotivasi
- B. Kegiatan pengembangan antara lain:
 - Bina kesehatan fisik antara lain olahraga, senam dan penyedia makanan tambahan. Bina rohani antara lain mengaji, kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan
- C. Bina peningkatan pendapatan usaha ekonomi produktif melalui UMKM, koperasi dan lain-lain.

Dari sisi ekonomi produktivitas lansia dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi-potensi-potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan lansia. Lansia yang produktif secara ekonomi menjadikan lansia meskipun mengalami berbagai penurunan secara fisik maupun psikis namun merasa puas karena dirinya mampu menghasilkan hasil ketrampilannya memiliki nilai ekonomi.³⁴ Pada akhirnya lansia merasa bermakna, berarti, sekaligus dapat menambah pendapatan ekonomi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari bahkan dapat memberi sesuatu untuk anak cucu.

Berdasarkan Modul Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Bagi Lansia oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kelompok kegiatan (poktan) keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga yang memiliki lansia dan lansia itu sendiri untuk

³⁴ Ibid, hlm 86.

meningkatkan kualitas hidup lansia dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan, kemandirian ber-KB bagi PUS anggota kelompok kegiatan.³⁵

Sedangkan menurut Buku Panduan Kader Tentang Lansia Tangguh Dengan Tujuh Dimensi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015, lansia tangguh adalah seseorang atau kelompok lansia yang sehat (secara fisik, mental), mandiri, aktif dan produktif. Lansia potensial adalah warga lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa.³⁶

Tujuh dimensi lansia tangguh terdiri dari:

- A. Spiritual
- B. Intelektual
- C. Fisik
- D. Emosional
- E. Sosial Kemasyarakatan
- F. Profesional Vokasional
- G. Lingkungan

Kaitannya dengan pelaksanaan program untuk lansia, tidak terlepas dari faktor penghambat dan pendukung yang secara tidak langsung terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang asas, arah, dan tujuan serta tugas dan tanggung jawab kesejahteraan lanjut usia.³⁷

³⁵ Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Modul Pengembangan Ekonomi Produktif Bagi Lansia*, (Semarang: BKKBN, 2013), hlm 89.

³⁶ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Buku Pegangan Kader Tentang Lansia Tangguh Dengan Tujuh Dimensi*, (Jakarta: BKKBN, 2015), hlm 102.

³⁷ Presiden RI, Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1998, tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

A. Pasal 4

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan, terpeliharannya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B. Pasal 7

Pemerintah bertugas mengarahkan membimbing dan mengarahkan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

C. Pasal 8

Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Dari beberapa pengertian dari berbagai sumber di atas dapat disimpulkan bina keluarga lansia atau BKL, merupakan wadah atau organisasi untuk berkegiatan lansia atau keluarga yang memiliki lansia yang oleh dicanangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan bertujuan untuk mensejahterakan lansia melalui program-program pemberdayaan, ekonomi produktif, tata cara perawatan dan pengasuhan lansia sehingga tercipta lansia sejahtera, mandiri, produktif, semangat dan berdaya.

C. Usaha Ekonomi Produktif

Pelaksanaan merupakan salah satu bagian dari manajemen program, pelaksanaan atau yang biasa disebut dengan pergerakan merupakan suatu keseluruhan usaha, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota atau

organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif dan ekonomis.³⁸ Pelaksanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang berhubungan dengan aktifitas manajerial dalam pelaksanaan tugas *execuation*. Pelaksanaan atau pergerakan (*actuating*), adalah tindakan memulai, memprakarsai, memotivasi, dan mengarahkan serta mempengaruhi para pekerja mengerjakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi.³⁹

Pelaksanaan merupakan tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok mau dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan para anggota yang menyebabkan para anggota mau untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam melaksanakan suatu program perencanaan turut berpengaruh besar terhadap pelaksanaan suatu program, hal ini karena perencanaan dan pelaksanaan merupakan suatu kesatuan yang saling mengikat.

Kaitannya dengan pelaksanaan merupakan usaha atau aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi semua kebutuhan seperti alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, tempat pelaksanaannya dan bagaimana cara melaksanakan, kemudia setelah program dan dan kebijaksanaan ditetapkan atas pengambilan keputusan suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah langkah strategis, kebijaksanaan maupun operasional menjadi nyata guna mencapai sasaran dari program yang sudah

³⁸ Siagiaan, S.P, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta:PT Bumi Akasara,2007), hlm 32.

³⁹ Kurniadin.D & Machali, I, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm 76.

ditetapkan di awal.⁴⁰ Pelaksanaan merupakan aktifitas-aktifitas atau eksekusi dari suatu program di suatu organisasi yang didasarkan pada suatu perencanaan yang sudah dirancang dan ditetapkan sebelumnya.

Adapun tujuan program mencakup tujuan antara (*intermediate goal*) yaitu keluaran (*output*) dan tujuan akhir (*final goal*) yaitu pengaruh atau dampak (*outcome*). Secara umum “program” dapat diartikan sebagai “rencana”, program didefinisikan sebagai salah satu unit kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.⁴¹ Ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program, yaitu:

- A. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan.
- B. Terjadi dalam waktu yang relatif lama, bukan tunggal tetapi jamak dan berkesinambungan.
- C. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Program dapat diartikan sebagai kegiatan yang disusun secara terencana dan memiliki tujuan, sasaran isi dan jenis kegiatan, pelaksana program kegiatan, proses kegiatan, waktu, fasilitas, alat-alat, biaya dan sumber-sumber pendukung lainnya. Dalam pelaksanaan program, terdapat tiga unsur mutlak

⁴⁰Syukur, *Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansi Dalam Pembangunan*, (Ujung Pandang: Persadi, 2011), hlm 112.

⁴¹Arikunto, S & Safirudin, C, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm 32.

dan penting oleh karena itu dalam melaksanakan suatu program diperlukan unsur-unsur yang berpengaruh.⁴² Unsur tersebut terdiri dari :

- A. Adanya program (kebijakan) yang dilaksanakan
- B. Target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran diharapkan akan menerima manfaat dari program-program tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan.
- C. Unsur pelaksana (implementator), baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan.

Program merupakan suatu sistem yang kegiatannya berkesinambungan dan didasarkan pada tujuan suatu kebijakan yang melibatkan suatu anggota kelompok serta terdiri dari komponen yang saling melengkapi guna mencapai suatu tujuan.

Dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat merencanakan beberapa kebijakan program perekonomian untuk masyarakat, diantaranya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk menanggulangi masalah-masalah kemiskinan, pengangguran, peningkatan angka produktifitas masyarakat. Salah satu cara dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat dapat melalui program usaha ekonomi produktif yang sarannya merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang belum berdaya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.⁴³

⁴² Fita Isniani, *Implementasi Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. Skripsi UNY.*

⁴³ Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005), hlm 102.

Pedoman Kelompok Usaha Bersama Tahun 2011, tentang usaha ekonomi produktif (UEP) disebutkan bahwa usaha ekonomi produktif merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan, tabungan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.⁴⁴

Adapun anggaran yang digunakan dalam usaha ekonomi produktif berasal dari bantuan pemerintah yang berada di bawah naungan dinas sosial, dimana bantuan tersebut bersifat sementara dan ditujukan untuk masyarakat miskin yang diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan kemandirian masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan pendampingan oleh dinas sosial dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan perkembangan usaha ekonomi tersebut.⁴⁵

Kegiatan kerja ekonomi produktif merupakan suatu kegiatan ketrampilan usaha dan terampil kerja. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh penghasilan, penghasilan yang diperoleh dari hasil kerjanya dapat digunakan.⁴⁶ Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa usaha ekonomi produktif adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia guna mengatasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, yang bertujuan meningkatkan ketrampilan, pendapatan, produktifitas, mitra kerja serta kemandirian masyarakat di

⁴⁴ Kementerian Sosial RI, *Modul Pendampingan Pelayanan Sosial Lanjut Usia*, (Jakarta: Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia, 2014), hlm 167.

⁴⁵ Ibid, hlm 186.

⁴⁶ Hardiati, E, *Lansia Juga Bisa Bekerja*, (Yogyakarta: B2P3KS Press, 2009), hlm 23.

bidang perekonomian melalui kegiatan kewirausahaan dan usaha lainnya yang dilakukan melalui suatu kelompok di masyarakat.

Dalam prinsipnya lansia mampu aktif dalam setiap kegiatan di hari tua, pemikiran tersebut disebabkan oleh lingkungan sosial yang kurang mampu memberikan ruang partisipasi untuk mengaktualisasikan potensi serta pengalamannya yang diperoleh dari perjalanan hidupnya. Lansia yang masih aktif bekerja tidak lepas dari makna produktif, usaha ekonomi produktif merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu, berupa hal baru yang didapat dari membaca, benda, tulisan, dan hal baik lainnya.

Sesuai dengan pengertian usaha ekonomi produktif, dapat diperoleh tujuan dari adanya program Usaha Ekonomi Produktif yang bertumpu pada Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per-19/PB/2005 yaitu,⁴⁷

- A. Meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi.
- B. Meningkatkan kemampuan usaha ekonomi.
- C. Meningkatkan produktifitas kerja.
- D. Meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Sedangkan menurut Buku Pegangan Kader Tentang Lansia Tangguh Dengan Tujuh Dimensi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015, berbagai peluang dalam pengembangan industri dan usaha ekonomi produktif dapat dilakukan lansia melalui berbagai bidang.⁴⁸

⁴⁷ Kemenkeu, *Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per 19/PB/2005, tentang Tujuan Usaha Ekonomi Produktif*, hlm 33.

⁴⁸ Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan, *Kelompok Bina Keluarga Lansia*, (Jakarta: BKKBN, 2015), hlm 56.

- A. Bina ekonomi kreatif, misalnya batik dan berbagai bentuk kesenian lain.
- B. Bidang konsumsi barang, misalnya mebel (meja, kursi, almari).
- C. Bidang kesehatan dan pengobatan tradisional, misalnya jamu dan pijat.
- D. Bidang wisata dan kuliner.
- E. Bidang industri rumah tangga.
- F. Bidang bisnis sosial pengasuhan anak dan lansia rentan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa usaha ekonomi produktif adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia guna mengatasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi yang bertujuan meningkatkan ketrampilan, kesejahteraan, pendapatan produktifitas serta kemandirian masyarakat.

Pengertian usaha ekonomi produktif bagi lansia adalah kegiatan produktif di bidang ekonomi yang dilakukan diupayakan sebagai perpaduan kegiatan kreatif.⁴⁹ Dengan adanya kegiatan ini diharapkan memberikan sumbangsih kepada lansia dalam mengembangkan usaha yang dapat membantu memberdayakan lansia, dan sebagai salah satu kegiatan rekreatif bagi lansia agar dapat menikmati masa tuanya.

Penetapan jenis usaha ekonomi produktif disesuaikan dengan kondisi lingkungan, potensi wilayah dan ketrampilan dari anggota kelompok

⁴⁹ Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional *Pengembangan Ekonomi Produktif Bagi Lansia* (Jakarta: BKKBN, 2012), hlm 4.

serta kebutuhan masyarakat akan produk yang dipasarkan. Adapun jenis usaha dibidang ekonomi produktif berdasarkan usahanya terdiri dari.⁵⁰

- A. Usaha yang termasuk bidang usaha pertanian meliputi peternakan, perikanan, tanaman hias, dan tanaman pangan.
- B. Usaha bidang industri kecil dan industri rumah tangga meliputi kerajinan, anyaman, makanan kecil, minuman, bahan bangunan/mebel, dan produk kreatif.
- C. Usaha yang termasuk bidang perdagangan dan jasa meliputi warung makan/jajanan kebutuhan sehari-hari, kios/toko kelontong/sembako, kios oleh-oleh makanan khas daerah, warpos, warung pulsa dan telepon, serta warnet.

D. Teori Produktivitas

Produktivitas kerja merupakan suatu istilah yang sering digunakan dalam perencanaan pengembangan industri pada khususnya dan perencanaan pengembangan ekonomi. Pengertian produktivitas pada umumnya lebih dikaitkan dengan pandangan produksi dan ekonomi, sering pula dikaitkan dengan pandangan produksi dan ekonomi, seringpula dikaitkan dengan pandangan sosiologi.

Menurut Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo produktivitas adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil (jumlah barang dan jasa)

⁵⁰ Ibid, hlm 6.

dengan sumber (jumlah tenaga kerja, modal, tanah, energy, dan sebagainya) yang dipakai untuk menghasilkan hasil tersebut.⁵¹

Sedangkan konsep produktivitas menurut piagam OSLA tahun 1984 adalahh :⁵²

- A. Produktivitas adalah konsep universal, dimaksudkan untuk menyediakan barang dan jasa untuk semakin banyak barang orang dengan menggunakan sedikit sumberdaya.
- B. Produktivitas berdasarkan atas pendekatan multidisiplin yang secara efektif merumuskan tujuan rencana pembangunan dan pelaksanaan cara-cara produktif dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien namun tetap menjaga kualitas.
- C. Produktivitas terpadu menggunakan ketrampilan modal, teknologi manajemen, informasi, energy, dan sumberdaya lainnya untuk mutu kehidupan yang mantap bagi manusia melakukan konsep produktifitas secara menyeluruh.
- D. Produktivitas berbeda di masing-masing Negara dengan kondisi, potensi, dan kekurangan serta harapan yang dimiliki oleh Negara yang bersangkutan dalam jangka panjang dan pendek, namun masing-masing Negara mempunyai kesamaan dalam pelaksanaan pendidikan dan komunikasi.

⁵¹ Basu Swastha & Ibnu Sukotjo, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Andi Offset, 1995), hlm 123.

⁵² Purnama, A., et al, *Produktif Di Usia Lanjut*, (Yogyakarta: B2P3KS Press, 2015), hlm 122.

- E. Produktivitas lebih dari sekedar ilmu teknologi dan teknik manajemen akan tetapi juga mengandung filosofi dan sikap mendasar pada motivasi yang kuat untuk terus-menerus berusaha mencari mutu kehidupan yang baik.

E. Perspektif Ekonomi Islam Lansia

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah salah satu ilmu yang multi dimensi/interdisiplin, komprehensif, dan saling terintegrasi, meliputi ilmu islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist, dan juga ilmu rasional (hasil pemikiran dan pengalaman manusia), dengan ilmu ini manusia dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan sumber daya untuk mencapai falah (kebahagiaan).⁵³ Falah (kebahagiaan) yang dimaksud adalah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia, yang meliputi aspek spiritualias, moralis, ekonomi, sosial, budaya serta politik, baik dicapai didunia ataupun di akhirat. Ali anwar yusuf memberikan definisi ekonomi menurutnya ekonomi kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya.⁵⁴

Sedangkan pengertian ekonomi islam secara etimologi terdapat pengertian menurut beberapa para ahli ekonomi islam sebagai berikut:

- A. M. Akram Kan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang

⁵³ Veithal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Econimics: Ekonomi Bukan Opsi Tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 91.

⁵⁴ Ibid, hlm 325.

dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan berpartisipasi.⁵⁵

- B. Yusuf Qardhawi memberikan pengertian ekonomi islam adalah ekonomi yang berdasarkan kepada ketuhanan. Sistem ini bertolak dari Allah SWT, bertujuan kahir kepada Allah SWT, dan menggunakan saran yang tidak lepas dari syariat Allah.⁵⁶
- C. Muhammad Abdul Manam memberikan pengertian ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai islam.⁵⁷

2. Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam

Prinsip dan tujuan ekonomi islam bersumber pada ajaran syari'at islam yang dikembangkan dan di jabarkan oleh para ulama dan para pemikir-pemikir muslim. Sebagaimana prinsip yang ditanamkan dalam ekonomi islam ketahuidan, dan kekhalifahan.

- A. Tauhid, melahirkan kesadaran tanggung jawab penuh kepada Allah SWT dalam berekonomi, serta memahami ekonomi sebagai perintah ibadah. Aktifitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya mengutamakan nilai ekonomis, namun juga diiringi dengan pengakuan terhadap

⁵⁵ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), hlm 16.

⁵⁶Surya Pos, *Pengertian Ekonomi Islam*, Artikel di akses pada tanggal 10 Desember 2017 di <http://www.suryapost.com/2010/12/pengertian-ekonomi-islam.html>.

⁵⁷ Veithal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Bukan Opsi Tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 325.

keesaan Allah sehingga apa yang dilakukan harus dengan tanggung jawab.⁵⁸

- B. Khalifah, kesadaran sebagai wakil Allah di muka bumi melahirkan sikap, berekonomi yang benar sesuai dengan syari'at islam, berekonomi semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia, dan berupaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia.⁵⁹
- C. Ibadah, keseluruhan hidup manusia dan selaras dengan ridho Allah SWT.⁶⁰

Yusuf Al Qadrawi juga menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang membangun ekonomi islam adalah sebagai berikut:

- A. Ekonomi islam menghargai nilai harta benda dan kedudukannya dalam kehidupan. Harta merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dan membantu melaksanakan kewajiban, seperti sedekah, jihad, serta persiapan utama untuk memakmurkan bumi.
- B. Ekonomi islam mempunyai keyakinan bahwa harta sebenarnya milik Allah, sedangkan manusia hanya memegang amanah darinya, Allah berfirman dalam Q.S Al-haddid ayat 7:⁶¹

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِۗ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ
وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۙ

⁵⁸ Ruslan Abdul Ghofur , *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Formal Keadilan Ekonomi Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 66.

⁵⁹ Ibid, hlm 69.

⁶⁰ Ibid, hlm 72.

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran terjemahannya*, (Surabaya, Pustaka Assalam, 2010), hlm 671.

Artinya: “berimanlah kamu kepada Allah dan rosulnya infakanlah (dijalan Allah) sebagian dari harta yang ada dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menginfakkan (hartanya dijalan Allah) memperoleh yang besar.”

- C. Ekonomi islam memerintahkan manusia untuk berkreasi dan bekerja dengan baik. Islam mengajak kita untuk berusaha dan bekerja. Islam memperingatkan kita dari sikap putus asa dan rasa malas. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ١٥

Artinya: “dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah disegala penjurunya dan makanlah dan sebagian dari rezeki-nya. Dan hanya kepada-nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”⁶²

- D. Ekonomi islam mengajarkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bagi umat. Tanpa kemandirian ekonomi, umat islam tidak bisa menjalankan Ustadziatul’Alam (soko guru dunia) dan menjadi saksi-saksi kebenaran atas umat yang lainnya.
- E. Ekonomi islam mengharamkan pendapatan dari pekerja yang bathil, Rasulullah Swt. Bersabda dalam HR. Ahmad yang artinya, “setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya”
- F. Ekonomi islam mengakui hak kepemilikan pribadi dan memeliharaanya

⁶² Q.S Al-Mulk (67) : 15.

- G. Ekonomi islam melarang pribadi untuk menguasai atau memonopoli barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat
- H. Ekonomi islam mencegah kepemilikan dari suatu yang membahayakan orang lain.
- I. Ekonomi islam menganjurkan untuk mengembangkan harta dengan sesuatu yang tidak membahayakan akhlak dan kepentingan umum. Pemilik uang tidak boleh menimbun dan menahannya dari peredaran ketika umat dalam keadaan membutuhkan untuk memfungsikan uang tersebut, dengan pekerjaan yang bermanfaat dan dapat membuka lapangan kerja bagi para pengangguran dan menggairahkan aktifitas perekonomian. Tidak heran jika Al-Quran memberi peringatan kepada orang-orang yang menyimpan harta dan bersifat egois dengan ancaman yang berat, Allah SWT, Berfirman dalam Q.S At-Taubah ayat 34-35:⁶³

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٣٤ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝٣٥﴾

Artinya: “...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, inilah harta bendamu yang kau simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akhirat dari) apa yang kau simpan itu.”

⁶³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran terjemahannya, (Surabaya, Pustaka Assalam, 2010), hlm 104.

- J. Ekonomi islam menganjurkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bagi umat. Tanpa kemandirian ekonomi, umat islam tidak bisa menjalankan Ustadzul'Alam (soko guru dunia) dan menjadi saksi-saksi kebenaran atas umat lainnya. Allah SWT. Berfirman dalam, Q.S Al-Baqarah ayat 143:⁶⁴

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّكُمْ عَلَى بَلَاءٍ عَظِيمٍ

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ ١٤٣

Artinya: "...Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kamu tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti rasul dan siapa yang berbalik kebelakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih Maha Penyayang kepada manusia."

- K. Ekonomi islam mengajurkan adil dan berinfak atau menjaga kesinambungan dalam berbelanja
- L. Ekonomi islam mewajibkan Tafakul (saling menanggung) diantara anggota masyarakat

⁶⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran terjemahannya, (Surabaya, Pustaka Assalam, 2010), hlm 221.

M. Ekonomi islam memperdekat jarak perbedaan antara (tingkat) di tengah masyarakat. Dalam hal ini, untuk mempersempit kesenjangan sosial.

Sistem ekonomi islam mengandung standard prinsip-prinsip dasar hukum ekonominya, yaitu prinsip ibadah (Tauhid), keadilan (*Al-Adl*), tolong-menolong (*At-Ta'awun*), toleransi (*At-Tasamuh*).⁶⁵

F. Pandangan Islam Terhadap Lanjut Usia (Lansia)

Agama islam memandang masyarakat lansia dengan pandangan terhormat sebagaimana perhatiannya terhadap generasi muda. Agama islam memperlakukan dengan baik para lansia dengan mengajarkan metode supaya keberadaan mereka tidak dianggap sia-sia dan bernilai di masyarakat. Dukungan terhadap para lansia dan penghormatan terhadap mereka adalah hal yang ditekankan dalam islam. Nabi Muhammad Saw bersabda, penghormatan terhadap para lansia muslim adalah ketundukan kepada Tuhan. Beliau menegaskan, berkah kebaikan abadi bersama para lansia kalian.⁶⁶

Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat berkewajiban memerhatikan kondisi para lansia, agama islam menilai lansia sebagai hal yang sangat penting, sehingga pemerintah berupaya menyiapkan sistem yang menangani dan membantu para lansia dan mengucurkan berbagai bantuan, baik materi maupun moral kepada mereka supaya hidup dengan layak sehat dan bahagia.

Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra' : 23-24

⁶⁵ Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, Loc, Cit, hlm 71.

⁶⁶ Lailia Dwi Anggraini, *Jurnal Pandangan Islam Terhadap Lansia Serta Berbagai Kesehatan Lansia Yang Perlu di Perhatikan*, (Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2016), hlm 8.

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ٢٤﴾

Artinya: *Dan tubuhmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan berbuatbaik pada ibu bapakmu. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaan, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “Ah” dan janganlah engkau membentak mereka dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah “wahai tuhanku sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku diwaktu kecil”.*⁶⁷

G. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Lansia

Dalam islam, berbagai permasalahan perekonomian telah dijamin dalam pengoptimalan distribusi, yaitu dengan cara menentukan tata cara pemilikan, tata cara mengelola kepemilikan, serta mensuplai orang yang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan harta yang bisa menjamin hidupnya dalam rangka mewujudkan keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya diantara sesama. Instrumen zakat digunakan untuk menanggulangi kemiskinan dapat mencangkup perluasan kesempatan kerja, kesejahteraan keluarga, rehabilitasi manusia usia lanjut, asuransi pengangguran, kompensasi bagi yang berkekurangan ketika resesi dan depresi.⁶⁸

Bahwa Negara memberikan perhatian dengan memberikan program Bina Keluarga Lansia (BKL) untuk meningkatkan produktivitas para lansia supaya

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran terjemahannya, (Surabaya, Pustaka Assalam, 2010), hlm 458.

⁶⁸ Murasa Sarkaniputra dkk, *Tauhidi Epistimologi*, (Jakarta: Tanpa Penerbit, 2003), hlm 29.

tidak menjadi tanggungan keluarga. Dalam ekonomi Islam instrumen zakat juga diperuntukkan bagi para lansia dan orang jompo, dengan memberikan bantuan pembiayaan Qardul Hasan yaitu dengan memberikan modal sebagai modal usaha yang tidak dikenai biaya bagi hasil.

Dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW, jelaslah bahwa negara Islam dalam kedudukannya sebagai wali bagi kaum miskin dan mereka yang tidak berpengharapan, bertanggung jawab menyediakan kebutuhan paling dasar bagi warga negaranya yang fakir dan miskin. Khususnya dalam penerimaan negara yang berasal dari zakat, harta rampasan perang dan fai, dimana Al-Quran telah menegaskan dengan khusus mengenai bagian atau hak dari fakir dan miskin.⁶⁹ Berikut beberapa ayat-ayat Al-Quran dan Hadist yang menjadi konsep utama dalam jaminan sosial:

سَلُّوْكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِيْنَ
وَأَبْنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۙ ٢١٥

Artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan, jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sungguh Allah Maha Mengetahuinya.” (QS. Al Baqarah [2] : 215).⁷⁰

Menurut Sharif bahwa setiap orang yang hidup dalam negara islam berhak mendapatkan kebutuhan dasarnya. Jika ia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar itu baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya karena mengaggur, sakit, cacat, usia tua atau lain sebagainya, maka negara islam

⁶⁹ Sharif, Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm 254.

⁷⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran terjemahannya*, (Surabaya, Pustaka Assalam, 2010), hlm 313.

wajib mencukupi kebutuhan dasar yang dibutuhkannya. Jika negara tidak memiliki sumber yang cukup maka negara harus menemukan cara untuk menolong warganya yang memerlukan itu.⁷¹

Dalam definisinya itu sendiri Negara kesejahteraan merupakan sebuah Negara yang Pemerintahannya bertanggung jawab terhadap pemenuhan standar kehidupan minimal bagi setiap warganya. Dimana pemenuhan standar kehidupan minimal masyarakat tersebut, dapat mencangkup atas 5 kriteria, yaitu antara lain:

- A. Penyedia jaminan sosial bagi semua masyarakat tidak terkecuali masyarakat yang mengalami kecelakaan, sakit, pengangguran, usia lanjut dan cacat.
- B. Terciptanya keadilan sosial atau distribusi pendapatan (kekayaan) secara merata dan adil melalui penggunaan akan pajak atau pengeluaran pemerintah yang efektif, sehingga menimbulkan pemerataan khususnya antara masyarakat miskin maupun kaya.
- C. Penyedia layanan pendidikan dan kesehatan gratis.
- D. Dipertahankannya tingkat *fullemployment* atau dalam kata lain adanya penanggulangan Pemerintah terhadap pengangguran, dimana dalam hal ini Negara memiliki tanggung jawab penuh atas ketersediannya lapangan kerja bagi mereka yang mampu bekerja.
- E. Kepemilikan publik atas fasilitas umum sehingga adapat diberikan kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, agar sebagian

⁷¹ Ibid, hlm 285.

masyarakat tersebut mampu untuk menikmatinya seperti halnya tersedianya perpustakaan umum, lingkungan yang eksklusif dimana bagi sebagian masyarakat ini belum mampu/tidak bisa menikmatinya.⁷²

Masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan finansial dari suatu Negara, telah disebutkan pula antara lain:⁷³

- A. Semua orang miskin yang memerlukan bantuan.
- B. Mereka yang tidak mampu atau menderita cacat.
- C. Orang-orang yang tidak berpengharapan seperti anak yatim, janda dan penganggur.
- D. Pengungsi atau buronan yang terpaksa meninggalkan kampung halaman beserta hartanya dalam keadaan tertekan.
- E. Mahasiswa, guru, mubaligh khususnya yang membaktikan hidupnya untuk mempelajari dan mendakwakan islam.
- F. Masyarakat yang tertimpa bencana.
- G. Semua karakteristik lain yang tidak berpengharapan, menderita dan melarat atau terpaksa mengemis demi mendapatkan makan dan pakaian.

Sehingga berdasarkan hal ini pula, maka dapat dikemukakan bahwa konsep Negara Islam merupakan sebuah Negara kesejahteraan yang menjalankan sejumlah fungsi-fungsi disamping fungsi tradisional dalam mencapai kesejahteraan sosial ekonomi yaitu dengan memfokuskan pada tujuan kesejahteraan religi spiritual.

⁷² Ibid, hlm 303.

⁷³ Ibid, hlm 309.

H. Penelitian Terdahulu

1. Pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di panti Sosial Tresna Werdha Abiyoso.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di Panti Sosial Tresna Abiyasa dimulai dengan persiapan dan pelaksanaan. Tahap persiapan meliputi tempat, materi, jenis program kegiatan, dan waktu pelaksanaan sedangkan tahap pelaksanaan menggunakan metode ceramah dan praktik. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia melalui program eksistensi diri, sosialisasi, komunikasi sosial, serta aktualisasi diri, upaya untuk meningkatkan kualitas program yaitu kegiatan unggulan program peningkatan komunikasi sosial dalam bentuk bimbingan sosial kecil dan besar. Dampak program program kesejahteraan sosial lanjut usia terdiri dari dampak eksistensi diri, sosialisasi, komunikasi sosial, aktualisasi diri. Faktor pendukung yaitu adanya kerjasama dari berbagai instansi, dana prasarana yang memadai, serta program keagamaan. Faktor penghambat yaitu lanjut usia yang susah diatur, kurangnya komunikasi dengan keluarga lanjut usia dalam program kegiatan.⁷⁴

Penelitian yang relevan diatas, berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai Pelaksanaan Program Ekonomi Produktif oleh Bina Keluarga Lansia. Disini kesamaan objek dasar penelitian yaitu terkait pelaksanaan program dan subjek terkait dengan lansia. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada jenis program penelitian

⁷⁴ Tika Kumalasari, *Skripsi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di panti Sosial Tresna Werdha Abiyasa* (Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hlm 211.

yaitu program peningkatan kesejahteraan sosial dan program usaha ekonomi produktif.

2. Pelaksanaan program pengembangan masyarakat bagi kelangsungan hidup lansia dengan cara mengembangkan potensi alam di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian potensi alam yang berada di dusun Grigak berupa daerah pertanian dan peternakan, tumbuhan yang banyak tumbuh ditempat tersebut antara lain tumbuhan randu yang menghasilkan kapuk untuk pembuatan kasur, ketela pohon untuk bahan pembuatan makanan ringan, sedangkan di daerah Pentingsari berupa sumberdaya alam yang merupakan daerah pegunungan dengan udara yang sejuk merupakan daerah wisata tumbuhan yang banyak tumbuh berupa salak dan budidaya jamur.

Penelitian yang relevan diatas, berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan sumberdaya alam disekitar. Disini kesamaan objek dasar penelitian yaitu pada lansia. Adapun perbedaan terkait pelaksanaan program dan subjek penelitian yaitu program pengembangan sumberdaya alam dan program usaha ekonomi produktif.⁷⁵

3. Peran pekerja sosial di panti sosial tresna werdha (PSTW) Yogyakarta unit budi luhur dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang ada di PSTW Yogyakarta unit budi luhur antara lain meliputi pelayanan

⁷⁵ Siti Partini, *Jurnal Pengembangan Model Pemberdayaan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Lokal Untuk Lanjut Usia Miskin*, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hlm 147.

pengelolaan makanan, pelayanan fisik, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pendampingan ketrampilan dan kesenian. Peran pekerja sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lansia di PSTW Yogyakarta unit budi luhur adalah pekerja sosial sebagai pendidik, pekerja sosial sebagai pembela, pekerja sosial sebagai mediator.

Penelitian yang relevan diatas, berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai peran puskesmas dalam upaya memberdayakan lansia untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Disini kesamaan objek sebagai dasar penelitian yaitu mengenai pemberdayaan lansia untuk meningkatkan kesehatan. Adapaun perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan yaitu terdapat pada subjek lembaga yang berbeda.⁷⁶

4. Kualitas hidup lanjut usia di Panti Werdha Hargo Dedali Surabaya

Dari hasil penelitian ini didapatkan dalam kategori kurang baik karena pada faktor fisik dan faktor sosial, kategori cukup didapatkan pada faktor lingkungan, dan kategori baik didapatkan pada faktor psikologis. Kesejahteraan menjadi salah satu parameter tingginya kualitas hidup lanjut usia. Kesejahteraan ini bisa dicapai bila keempat faktor yang mempengaruhi kualitas hidup, seperti faktor fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan dapat mencapai kondisi sejahtera.

Penelitian yang relevan diatas, berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai peran Panti Werdha Hargo Dedali Surabaya dalam meningkatkan kualitas hidup para lansia. Disini kesamaan objek dasar yaitu

⁷⁶ Skripsi Swastika Dela Prabandewi, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hlm 176.

pada lansia. Adapun perbedaan yaitu terdapat pada subjek lembaga yang berbeda.⁷⁷

5. Dukungan sosial keluarga sebagai upaya pencegahan stres pada lansia dengan andropause di desa gebang, wilayah kerja puskesmas patrang Kabupaten Jember

Dari hasil penelitian andropause adalah usia 61 tahun sampai 70 tahun (63,6%). Karakteristik pendidikan lansia menunjukkan proporsi yang hampir merata, yakni pendidikan perguruan tinggi memiliki jumlah lansia terbesar yaitu (35,2%), dan pendidikan SMA berjumlah (30,7%), selebihnya yaitu pendidikan SD dan SMP. Karakteristik pekerjaan lansia lebih dari setengahnya yaitu pensiunan (53,4%), selebihnya pekerjaan wiraswasta (26,1%), dan petani (18,2%).

Penelitian yang relevan diatas, berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai peran keluarga sebagai upaya pencegahan stress pada lansia dengan andropause di Desa Gebang Kabupaten Jember. Disini kesamaan objek yaitu pada lansia. Adapun perbedaan yaitu terdapat pada subjek lembaga yang berbeda.⁷⁸

⁷⁷ Anis Ika Nur Rohmah, Purwaningsih, dkk, *Jurnal Keperawatan Kualitas Hidup Lanjut Usia (Quality of Life Eldery)*, (Universitas Airlangga, 2012), hlm 125.

⁷⁸ Nurfika Asmanigrum, Dodi Wijaya, dkk, *Jurnal Dukungan Sosial Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Stress pada Lansia dengan Andropause di Desa Gebang Kabupaten Jember*, (Universitas Jember, 2014), hlm 81.